

PERAN MEDIA DALAM REFORMASI BIROKRASI DI INDONESIA MENUJU TERCIPTANYA GOOD GOVERNANCE

(Pengalaman dari Program Media Yang Sehat Untuk Otonomi Daerah Yang Sehat)

Dyah Aryani P.

Abstrak

Pembicaraan tentang Good Governance dan Reformasi Birokrasi seharusnya tidak dipisahkan dari pembicaraan tentang peran media dalam mendukung dan mempercepat terwujudnya Good Governance maupun Reformasi Birokrasi. Pembicaraan tentang Good Governance dan Reformasi Birokrasi yang tanpa melibatkan peran media di dalamnya akan seperti sayur tanpa garam.

Pertanyaan mendasar yang layak diajukan terkait dengan peran media dalam Good Governance maupun Reformasi Birokrasi adalah, dimana atau pada posisi apa media mengambil peran dalam dua hal tersebut di atas ?

Pada beberapa negara penganut demokrasi, keberadaan media dipahami memiliki peran dan fungsi sebagai apa yang dikenal dengan *the Fourth Estate of Democracy* (pilar keempat). Media melaksanakan fungsi keempat dari 3 fungsi dan/atau pembagian kekuasaan menurut teori Montesquie, setelah legislatif, eksekutif dan yudikatif. Media hadir sebagai pengawas atas pelaksanaan dari fungsi-fungsi kekuasaan yang dilakukan oleh legislatif, eksekutif dan yudikatif. Mengapa legislatif, eksekutif dan yudikatif perlu diawasi ?

Mengutip kalimat Lord Acton seorang hakim terkenal di Inggris yang menyatakan "*power tends to corrupt, absolute power tends to absolute corrupt*", maka seorang yang memiliki atau memegang kekuasaan akan lebih mudah atau bertendensi untuk menyalahgunakan kekuasaannya itu. Penyalahgunaan kekuasaan sangat berpeluang terjadi jika kekuasaan itu tidak dibatasi dan bahkan tidak diawasi. Montesquie memang telah melakukan pembagian kekuasaan dalam 3 fungsi guna menghindari peluang penyalahgunaan atas kekuasaan itu. Dalam teori Montesquie lembaga yudikatif-lah yang mengemban peran untuk melakukan pengawasan dalam bentuk pengakuan hukum. Akan tetapi pernahkah terlintas dalam benak kita, bahwa besar kemungkinan pula ketiga lembaga ini saling berkolusi untuk melakukan penyalahgunaan kekuasaan ? ketiga lembaga ini secara bersama-sama, bermufakat, bersepakat untuk melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Jika keadaan ini terjadi, siapa yang melakukan pengawasan ? Rakyat harus melakukan pengawasan. Tetapi bagaimana caranya ? bukankah lembaga legislatif adalah merupakan perwakilan rakyat?

Harus ada pihak lain yang netral yang dapat mengambil alih fungsi pengawasan atas kekuasaan ketiga lembaga itu. Media dipercaya untuk melakukan fungsi ini. Melalui pemberitaan-pemberitaan yang disampaikannya, media melakukan pengawasan atas pelaksanaan fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif. Dengan cara mendengar, membaca dan melihat informasi yang disajikan media, media telah menjadi saluran bagi partisipasi publik untuk secara tidak langsung terlibat dalam pengawasan. Bagai gayung bersambut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara pada tahun 2004 pernah mengeluarkan Surat Edaran yang berisi perihal 276 Jenis Layanan Publik Yang Harus Di Informasikan Kepada Media.

Apakah semua media benar-benar melaksanakan fungsi pengawasannya ? Harus jujur pula diakui bahwa kebebasan dan kemerdekaan pers yang telah melahirkan dan menumbuhkan banyak media baru, telah tidak diikuti tentang tumbuh pesatnya kesehatan media. Sebagian besar media-media baru itu tidak sehat. Baik sehat secara managerial sebuah perusahaan penerbitan maupun sehat dari sisi substansi pemberitaan. Jika kondisi ini yang muncul, maka tentu saja dipertanyakan kualitas pengawasan yang dilakukan oleh media. Apakah media yang bersangkutan benar melakukan pengawasan atau hanya sekedar melakukan pemberitaan yang mengandung niat pencemaran nama baik.

Hasil penelitian Indonesia Media Law & Policy Centre (IMLPC) melalui program *Healthy Press Freedom for Healthy Local Autonomy* yang dilaksanakan di 23 Kabupaten/Kota di Indonesia selama kurun waktu 2005 – 2007 membuktikan bahwa sebagian besar media lokal masih jauh dari kata “sehat”. Artinya, media lokal masih jauh dari menjalankan peran melakukan pengawasan. Jika demikian adanya maka menjadi tugas dan tanggung jawab bersama untuk pula menyetatkan media di tingkat lokal.